BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.[1]

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompk dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah

[1] Sugeng, Budiharsono. *Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.* (Bogor : Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan) hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya?

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat adalah pesisir atau nelayan adalah mengadakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), program ini yang kemudian menjadi program nasional untuk memberdayakan masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat mendapatkan perhatian yang sangat besar dan dituangkan dalam bentuk kebijakan nasional. Melalui program kompensasi pengurangan subsidi BBM, diluncurkan bantuan dana ekonomi produktif untuk beberapa bidang yang dikelola oleh departemen terkait. Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, salah satu bentuk program kompensasi melalui peluncuran dana ekonomi produktif dikemas dalam bentuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang di mulai sejak tahun 2001.[2]

Dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir isu utamanya adalah masih sangat besarnya jumlah masyarakat yang kurang mampu (penghasilan dibawah standar rata-rata yang ditentukan) dan masih harus

---

[2] Didin S, Damanhuri. *Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi masalah kesehatan, kekurangan air bersih, abrasi, dan sulitnya mengcapai tingkat pendidikan yang layak, hal ini disebabkan belum dikelola dengan baik.

Menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung, sarana dan prasarana terbatas,. demikian pula tingkat aksesibilitas dan dana yang tersedia termasuk program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang merupakan hal utama dalam menentukan arah pemberdayaan. Konsep pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, negara, regional maupun Internasional, termasuk dalam bidang politik ekonomi, maupun lainnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejateraan mandiri masyarakat dengan ujng tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, kesewenangan dunia industri, gerakan moral, yang bermaksud memberikan baju moral kepada kekuatan (force) telanjang yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir.

Upaya pemberdayaan rakyat mencakup tiga-P yaitu, 1) Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2) Penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan – perubahan yang terjadi di masyarakat dan 3) Pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) Penguatan akses mencakup akses hukum, akses inpormasi, dan akses ekonomi, (b). Penguatan hak yang mengcakup: hak akses (*right of access*) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (*right of withadrawal*), dan hak pengelolaan (*right of management*), (c) Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mengcakup: nilai sosial, norma,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi (*players of the game*), kontrol (*control*), insentif, dan kebutuhan (*needs*).

Program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi faktual di wilayah pesisir adalah sebagai berikut: (a) Program Ekotoursm, (b), Nelayan, (c) Budaya Lokal, (d) Keterampilan, (e) Kerajinan Rakyat, dan (f) Tehnologi Tepat Guna..

Pemberdayaan (*Empowerment*) yang dikatakan oleh Oakley dan Marsden dalam Priyono, diartikan sebagai suatu proses yang memiliki dua kecenderungan: *Pertama*, Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan.

Kekutan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pengembangan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

Kedua, atau kecenderungan sekunder, menekankan pada proses simulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sesungguhnya kedua proses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus memulai kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalamim hambatan eksternal pada strutur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang daimaksud dapat berubah struktur pemerintah regional setingkat kabupaten,kota dan provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional.

Dalam hal ini proses pemberdayaan (*empowerment*) ditujukan untuk "membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengongtrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri.

Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan lingkungannya. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan sebuah progrram pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam nmenyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat maka kerjasama dapat terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan, yakni perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga harus dapat bersama-sama menikmati hasil dari pelaksanaan program secara adil terutama bagi masyarakat kecil.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, perwujudan pelibatan dan keterlibatan masyarakat meliputi kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Berbicara mengenai peluang berusaha perlu digaris bawahi bahwa peluang yang terbuka sebaiknya dilihat dari dua sisi yaitu:

a. Komponen primer, yakni komponen kegiatan/usaha yang terlibat langsung dengan pelayanan pengunjung seperti misalnya akomodasi, pelayanan makanan/minuman dan pengelolaan atraksi. Khusus mengenai pengusahaan akomodasi, berbicara pada skla komersial, komponen ini relatif membutuhkan investasi yang tinggi, jaringan pemasangan yang luas dan sistem pengelolaan yang professional.
b. Komponen pendukung, yakni komponen kegiatan atau usaha yang menunjang penyelenggaraan pelayanan terhadap pengunjung, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya hasil-hasil pertanian untuk komsusmsi pengunjung, pembuatan cenderamata, pelayanan transfor lokal. Komponen ini apa bila dikelola dengan baik dan benar, akan memberikan dampak ekomi yang tinggi bagi masyarakat luas.

Berdsarkan kedua komponen tersebut maka menyangkut kesempatan kerja bahwa dengan melalui pengembangan pariwisata akan terbuka sejumlah peluang kerja, tidak perlu dipertanyakan lagi. Lapangan kerja baru akan terbuka dengan bertumbuhnya komponen primer. Dan seiring dengan peningkatan kegiatan/ usaha komponen pendukung otomatis penyerapan tenaga kerja di sektor pendukung akan bertambah

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah *"Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Nelayan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep"* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisit (PEMP) di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat pesisir agar dapat dijadikan acuan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan moto masyarakat

b. Dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan tambahan bagi Fakultas Dakwah sebagai informasi ilmiah secara empiris maupun teoritis khususnya bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

c. Dari adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian Program Sarjana SI.

E. Definisi konsep

1. Pemberdayaan Ekonomi Nelayan

Berdasarkan aspek geografis, masyarakat pesisir merupakan masyrakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumber daya alam yang tersedia dilingkungannya, yakni dikawasan pesisir, perairan (laut), dan pulau-pulau kecil

Secara umum sumber daya perikanan (tangkap dan budi daya) merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Karena itu, sumber daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

perikanan mengambil peranan yang besar sebagai penggerak dinamika ekonomi lokal di Desa-desa pesisir. Dalam konteks tersebut, masyarakat nelayan merupakan pelaku utama yang ikut serta menentukan dinamika ekonomi lokal.

Kondisi masyarakat nelayan, kini merupakan hasil dari kebijakan pembangunan disektor perikanan yang disebut "Modernisasi Perikanan", sejak awal 1970-an.[3] Kebijakan yang bertumpu pada orientasi produktifitas ini telah melahirkan berbagai perubahan yang sangat penting dibidang sosial, ekonomi dan ekologi di masyarakat dan kawasan pesisir laut.

Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik tentang Ekonomi-*Politik* di abad ke delapan belas, namun akarnya dapat ditelusuri sampai pada hampir 25 abad yang lalu, ketika Plato dalam salah satu dialognya meletakkan dasar filosofis tentang hakekat negara sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk mencapai *Eudaimonia,* yaitu kebahagiaan sejati dan tertinggi, sedangkan Adam Smith yang di dalam buku *The Wealth of Nations* meletakkan dasar-dasar ekonomi pada zaman pembangunan sebagai suatu gerakan Internasional.[4]

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat neayan merupakan ide atau cita-cita yang dipandang identik dengan tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam acuan seperti masyarakan adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan UUD 45, peningkatan taraf hidup

---

[3] Kusnadi *"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir"* (Bandung : HUMANIORA. 2006), hal.3
[4] Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat, manusia indonesia seutuhnya. Secara populer dikatakan, pembangunan bertujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan atau kebodohan.

Dari konsep pemberdayaan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan lautan merupakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yaitu :

a. Strategi Fasilitatif yaitu strategi yang mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran suatu program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah.
b. Strategi Edukatif, yaitu strategi yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada masyarakat yang akan diberdayakan.
c. Strategi Persuasif, yaitu strategi yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai akses untuk monopoli.[5]

Inti dari empat strategi pemberdayaan di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang harus dilakukan agar masyarakat pesisir mau dan mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Nikijuluw menjelaskan tiga bentuk manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan lautan, yaitu Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM), pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah dan ko-manajemen (integrasi PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah).

PSPBM dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanannya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan, aspirasi dan mengambil keputusan untuk menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. Pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah berarti semua tahapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Keunggulan pengelolaan

---

[5] Didin S, Damanhuri. *Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme*. (Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri). hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumberdaya perikanan oleh pemerintah adalah dari sisi aspek legal, yang sangat didukung oleh aturan-aturan formal dan tertulis sehingga apabila setiap pihak dapat menjalankan dan mematuhi seluruh aturan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.

PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan. Kedua bentuk pengelolaan tersebut bisa dipadukan atau diintegrasikan sehingga kelemahan yang satu bisa ditutupi oleh keunggulan yang lain. Pengintegrasian kedua bentuk pengelolaan ini dikenal dengan nama kolaborasi manajemen, kooperatif manajemen atau ko-manajemen. Ko-manajemen menyiratkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan inti dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Secara umum, pembangunan perikanan dan kelautan pada masa lalu kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan nelayan seolah-olah diwarisi secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Salah satu indikasi kurangnya perhatian pemerintah adalah kecilnya jumlah alokasi kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan dan kelautan (hanya 0,02% dari total kredit) selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I hingga pertengahan PJP II. Sehingga sangatlah wajar apabila masyarakat pesisir sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, terbelakang dan termarjinalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dapat dituangkan dalam bentuk program-program nyata, yang merupakan program unggulan, terencana dan komitmen yang kuat. Bentuk program nyata tersebut adalah program peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan IPTEK serta pengembangan industri perikanan dan kelautan. Program PEMP adalah salah satu betuk program nyata tersebut.

Ditinjau dari bentuk strategi, program PEMP merupakan strategi fasilitatif dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan, yaitu strategi yang mengharapkan masyarakat pesisir dan nelayan sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki dan agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Pada program PEMP, yang menjadi agen dalam perubahan adalah TPD (Tenaga Pendamping Desa).

Pesoalan mendasar yang dipertanyakan tentu kemampuan TPD sebagai agen perubahan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat pesisir dan nelayan terhadap sumberdaya dan pilihannya. Untuk menunjang kemampuan TPD maka dilakukan TOT (*training of trainer*), tetapi dalam waktu yang singkat dan mungkin TOT tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tugas TPD.[6] Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program PEMP, TPD sebaiknya dipilih dari orang-orang yang memiliki

---

[6] Kusumastanto, T. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan.* (Bogor : Diktat Kuliah PS SPL – IPB. 2000). hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat meskipun harus dibayar lebih tinggi. Namun yang terjadi pada PEMP, justru TPD dipilih dari lulusan perguruan tinggi (tidak mesti perikanan) yang belum mendapatkan pekerjaan untuk diberdayakan sehingga muncul kesan PEMP merupakan lapangan kerja baru. Jika ini benar, maka *opportunity cost*-nya terlalu besar karena PEMP menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Secara umum, pembangunan perikanan dan kelautan pada masa lalu kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan nelayan seolah-olah diwarisi secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Salah satu indikasi kurangnya perhatian pemerintah adalah kecilnya jumlah alokasi kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan dan kelautan (hanya 0,02% dari total kredit) selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I hingga pertengahan PJP II. Sehingga sangatlah wajar apabila masyarakat pesisir sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, terbelakang dan termarjinalkan.[7]

Setidaknya, ada enam alasan utama yang dapat dijelaskan sehingga sektor perikanan dan kelautan layak menjadi sektor andalan.

1) Secara fisik laut merupakan faktor dominan dan pemersatu Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi ekonomi yang besar dan beragam, dimana ¾ wilayah Indonesia merupakan laut (5,8 juta km^2), negara kepulauan terbesar di dunia (lebih dari 17.500 pulau)

[7] Messie, Nawir.. *Environmental Policy Analysis and Approach.* (Bahan Kuliah Mata Kuliah Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.). 2004 hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memiliki 81.000 km garis pantai tropis terpanjang atau garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada.

2) Semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia dan kesadaran tentang gizi ikan yang lebih sehat dan mencerdaskan sehingga permintaan produk dan jasa kelautan dan perikanan terus meningkat.
3) Industri kelautan menciptakan *backward* dan *forward linkage* yang tinggi.
4) Sumberdaya kelautan sebagian besar merupakan sumberdaya *renewable* sehingga dapat menjadi basis pembangunan ekonomi berkelanjutan.
5) Sebagian besar kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan terdapat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga membantu masalah urbanisasi.
6) Dengan penguasaan dan penegakan kedaulatan dilaut berarti pertahanan, keamanan dan kedaulatan NKRI sebagai suatu kesatuan terjamin.[8]

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat mendapatkan perhatian yang sangat besar dan dituangkan dalam bentuk kebijakan nasional. Melalui program kompensasi pengurangan subsidi BBM, diluncurkan bantuan dana ekonomi produktif untuk beberapa bidang yang dikelola oleh departemen terkait.

---

[8] Didin S, Damanhuri. *Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.* (Bogor : Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan). DKP RI, *Profil LEPP-M3 dan Data Kelompok Masyararakat Pemanfaat (KMP) PEMP TA 2001 – 2003.* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI). hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, salah satu bentuk program kompensasi melalui peluncuran dana ekonomi produktif dikemas dalam bentuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang di mulai sejak tahun 2003.

Secara umum, PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Sasaran PEMP adalah masyarakat pesisir yang memiliki mata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi peisisr seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, yang kurang berdaya dalam peningkatan/penguatan usahanya.

Program ini menggunakan model pengembangan usaha yang bersifat perguliran/revolving yang dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat. Pinjaman modal melalui dana ekonomi produktif masyarakat yang diterima oleh sasaran wajib untuk dikembalikan agar terjadi perguliran kepada masyarakat pesisir lainnya yang membutuhkan serta terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistimatika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab, yang tersusun sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan introduksi dari seluruh informasi yang ada dalam penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORETIK

Pada bab II ini penulis menguraikan tentang kajian kepustakaan, berupa kajian teoretik yang berkaitan dengan jidul penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menyajikan bagaimana metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, urut analisis, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data sampai pada tahap akhir penelitian yakni tahap penelitian keputusan dan verifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab IV ini mendiskripsikan objek penelitian yaitu Pemberdayaan Ekonomi Nelayan (*Study kasus pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir "PEMP" di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep*). Kemudian menyajikan keseluruhan data yang diperoleh sesudah dengan fokus penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab V ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan laporan penelitian, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id